

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Syam Kususfi. 2013. "*Akuntansi Sektor Publik* ". Jakarta Salemba Empat.
- Afiati, A.T. 2013. "*Analisis Value For Money Pada Kineja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang*". Semarang.
- Agustin, R.D., Subardjo, A. "2017. "Konsep *Value For Money* Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik. Vol.6
- Arfan, D.A. 2014." Analisis *Value For Money* Dalam Mengukur Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012." Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2010. "*Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*". Cet.I. Yogyakarta BPFE.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Undang-Undang No.44 Tahun 2009. Tentang Rumah Sakit. Jakarta.2009
- Julia, C.R. 2014. " *Analisis Kinerja Rumah Sakit dengan Pendekatan Balance Scorecard* ". Bengkulu.
- Kirom Bahrul. 2015. " Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen". Bandung.
- Kristanti, I.O. 2016. " Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan *Value For Money*". Yogyakarta.
- Kuswoyo Endang. 2014. " *Analisis Value For Money Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Koni Provinsi Bengkulu* ". Bengkulu.
- Liando, H.S., dkk. 2014 " *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money*". Vol.2
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Lembaga Pemerintah
- Mahmudi. 2010. "*Manajemen Kinerja Sektor Publik* ". Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun. 2013 " *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* ". Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Menkes RI .2008. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008. Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Munir, Badrul. 2003“ *Perencanaan Anggaran Kinerja Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah* “. Yogyakarta.

Naim Nasril. 2013. “ Penerapan Konsep Value For Money Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Rumah Sakit Umum Labuang Baji Kota Makassar”. Makassar.

Oktoviana 2022

Pasalong. 2010. “ Teori Administrasi Publik “. Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007. Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000

Rasul. Sjahruddin. 2003.“ Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Dan Anggaran Dalam Perspektif Undan-Undang No.17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara. Jakarta Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia 1999. Undang-Undang Otonomi Daerah 22 Tahun 1999. Otonomi Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pendapatan Asli Daerah. Jakarta.

Sari, R.K. 2014. “Pengukuran Kinerja RSUD Ungaran Kabupaten Semarang Dengan Menggunakan Perspektif Keuangan dan Non Keuangan 2012-2013”. Semarang.

Undang-Undang Nomor 25. Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Wibowo. 2010. “ Manajemen Kinerja “. Jakarta: Rajawali Press